

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber daya Alamnya. Mineral, batu bara, dan pasir merupakan kekayaan alam yang tidak dapat luput dari pandangan kita. Hasil penambangan merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia tuhan yang maha esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengelolaannya itu harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah serta nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Bahan galian tambang merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga, diatur dan dimanfaatkan secara benar dan bijaksana. Karena itu untuk menjamin kesinambungan persediaan bahan galian tambang tersebut, diperlukan pengaturan dan pengelolaan agar kegiatan pertambangan tetap memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Semakin meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan usaha penambangan, akan memberikan konsekuensi meningkatnya potensi dan terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan disekitar lokasi penambangan. Dengan demikian, perlu diantisipasi dengan upaya-upaya nyata dan efektif dalam rangka pengendaliannya dengan menerapkan pola pengelolaan usaha penambangan yang berlandaskan pada kaidah

penambangan yang baik dan benar, sehingga kegiatan pembangunan penambangan dapat diarahkan untuk memperhatikan dan mempertahankan keseimbangan serta daya dukung fungsi lingkungan. Tata cara penambangan yang benar akan besar pengaruhnya terhadap kegiatan usaha penambangan, diharapkan kegiatan usaha penambangan akan lebih ekonomis dan efisien serta keamanan para pekerja dan kelestarian lingkungan akan lebih terjamin.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 1997 menjelaskan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai :

- a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena

dampak;

e. Sifat kumulatif dampak;

f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya

Namun dalam berbagai kejadian dan fenomena penambangan yang ada sering tidak mengedepankan mengenai dampak lingkungan yang ada disekitar penambangan, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan secara besar-besaran yakni rusaknya hutan, serta rusaknya sumber air yang ada, selain itu juga rusaknya berbagai sarana prasarana umum.

Hal demikian juga dijumpai di wilayah Ponorogo khususnya di kecamatan Ngebel, tepatnya di desa Ngrogung yakni penambangan batu kecil dan tanah uruk yang lebih dikenal dengan galian C, yang akhir-akhir ini mengalami berbagai macam kontroversi dan pertentangan. Dilihat dari berbagai sudut pandang, galian C yang ada di Kecamatan Ngebel memiliki dampak positif dan banyak pula berdampak negatif. Dari segi positif dengan adanya galian C dapat mengurangi pengangguran yang ada dikabupaten Ponorogo dan sekitarnya, dari empat titik pertambangan di desa Ngrogung, di setiap titiknya hampir ada 70 truk yang mengambil hasil tambang, sehingga sekitar 280 orang yang sebagai supir truk yang mencari nafkah dari kegiatan ini.

Dari masyarakat sekitar menambah penghasilan yang secara langsung sebagai pemilik tambang atau lahan maupun masyarakat sekitar yang dalam hal ini sebagai pengatur masuk dan keluarnya kendaraan truk. Pemerintah desa setiap bulannya juga mendapatkan pasokan dana yang

tidak mengikat dan tidak bersifat memaksa, selain Pemerintah desa, karang taruna juga mendapatkan kas dana sebesar empat ratus ribu rupiah.

Pemerintah daerah kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini sebagai pihak yang mengeluarkan izin penambangan mendapatkan hasil dari tambang yang ada, yakni dari segi izin pembukaan penambangan dan pajak, pemasukan yang diperoleh untuk daerah terbilang besar. Kemudian segi positif yang lain adalah masyarakat Ponorogo dan sekitarnya ketika membangun rumah ataupun pembangunan yang lainnya seperti proyek pemerintah, akan mudah dalam memperoleh material. Dari segi kualitas, material yang ada di pertambangan di desa Ngrogung Kecamatan Ngebel bisa dikategorikan kualitas yang sangat baik.

Dan dari segi negatifnya adalah rusaknya jalan menuju telaga Ngebel, dikarenakan volume truk yang melintas setiap hari sangat banyak hampir 70 truk yang ada pada satu titik pertambangan, di desa Ngrogung terdapat 4 titik pertambangan, sehingga rusaknya fasilitas utama jalan yang ada bisa berakibat banyak pada berbagai aspek. Diantaranya akan timbul polusi pada udara karena jalan yang rusak berpotensi mengeluarkan debu, sehingga debu yang berterbangan akan berdampak buruk pada udara, selain itu truk-truk pengangkut material yang ada dari berbagai mobilitasnya akan juga mengeluarkan polusi baik dari asap kendaraan dan material yang diangkutnya karena material yang ada bisa berterbangan.

Selain itu, rusaknya jalan juga akan memicu sumber kecelakaan , karena jalan yang licin dan berlubang kemudian jalan tidak merata mengakibatkan pengguna jalan bisa berpotensi mengalami kecelakaan. Dan

dari rusaknya jalan tersebut, Pemerintah kabupaten Ponorogo harus menanggung dalam proses perbaikan, karena jalan raya Ngebel merupakan jalan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Selain dari sarana prasarana, dampak negatif yang lain seperti perbukitan yang menjadi penahan air dari atas semakin hari semakin berkurang, dan bahkan sudah ada yang rata dengan tanah serta ada yang membentuk cekungan, hal ini berdampak pada potensi banjir yang akan terjadi pada masyarakat didaerah dataran rendah, karena fungsi perbukitan sebagai penahan dan resapan air sudah tidak ada.

Selain itu pengerukan secara besar-besaran dan secara terus menerus akan merusak dinding dari Telaga Ngebel. Walaupun jarak yang termasuk jauh, tetapi proses penggalian tanah terus menerus dilakukan, dan tanah yang saling kait mengkait, maka getaran akan sampai di dinding telaga, ditambah lagi postur tanah yang ada cenderung mudah terbawa oleh air. Hal demikian bisa berdampak buruk yakni adanya air bah yang akan menuju pada daerah yang ada dibawahnya, peristiwa demikian terjadi pada peristiwa jebolnya Situ Gintung, waduk buatan di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Banten, pada 27 Maret 2009 lalu, yang mengakibatkan 99 orang tewas dan ribuan rumah luluh lantak.

Dan masalah tidak berhenti, bekas galian yang membentuk cekungan ketika turun hujan maka akan digenangi oleh air sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, permasalahan diatas perlu segera ditangani oleh pemerintah, yakni adanya kebijakan yang mengatur tentang penanganan dampak dari penambangan. Setelah masalah dikenali dan diidentifikasi dengan baik, maka perencanaan kebijakan dapat dirumuskan

atau disusun. Kebijakan biasanya dikembangkan dari isu yang ada dimasyarakat, suatu isu tidak hanya mengandung ketidak sepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Namun demikian, tidak semua masalah masuk dalam agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

Maka, dari permasalahan-permasalahan diatas peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian terkait Penambangan yang ada di desa Ngrogung, kecamatan Ngebel kabupaten Ponorogo, dan fokus pada dampak kerusakan lingkungan yang ada baik yang berdampak pada saat ini maupun dampak pada masa yang akan datang. Dengan berlatar belakang uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul :

“KONFLIK SEGITIGA TERKAIT AKTIVITAS PENAMBANGAN GALIAN C DI DESA NGROGUNG KECAMATAN NGEHEL KABUPATEN PONOROGO”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada pemaparan pada studi pendahuluan dimuka dan dengan memperlihatkan pada fokus penelitian, maka yang menjadi kajian peneliti yaitu :

1. Konflik yang terjadi akibat penambangan.
2. Respon masyarakat desa Ngrogung terkait aktivitas penambangan.
3. Kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konflik yang terjadi akibat penambangan, respon masyarakat desa Ngrogung terkait aktivitas penambangan dan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kajian yang ada dalam perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

##### b. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten Ponorogo, untuk lebih berkembang dan inovatif dalam berperan menyelesaikan dampak lingkungan pada penambangan yang ada di

Kabupaten Ponorogo khususnya di desa Ngrogung kecamatan Ngebel

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran masyarakat agar lebih menjaga dan merawat lingkungan sekitar, serta lebih berperan aktif untuk memberikan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan antara lain:.

1. Konflik segitiga

konflik yang terjadi antara Pemerintah yang dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan, pihak penambang serta pihak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya penambangan.

2. Penambangan

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

### 3. Galian C

Unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1980.

## **F. Landasan Teori**

### 1. Kebijakan Publik

Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of public policy* (1971), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”, definisi lain mengatakan bahwa, “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan “ (Dye, 1995:1), lain dari itu, Richard Rose (1969):x) pun berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai, sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.” Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Fredrich (1969:79) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, “ serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan

(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. “ untuk maksud dari kebijakan sebagai dari kegiatan, friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan.

Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton (1965:212) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya . Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

a. Karakteristik definisi kebijakan publik

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.

Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan, tetapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan dalam perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa

yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.

*Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir, *kelima*, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya risiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi legal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

b. Perumusan masalah

Perumusan masalah menurut William Dunn (1999:26) akan sangat membantu para analisis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan

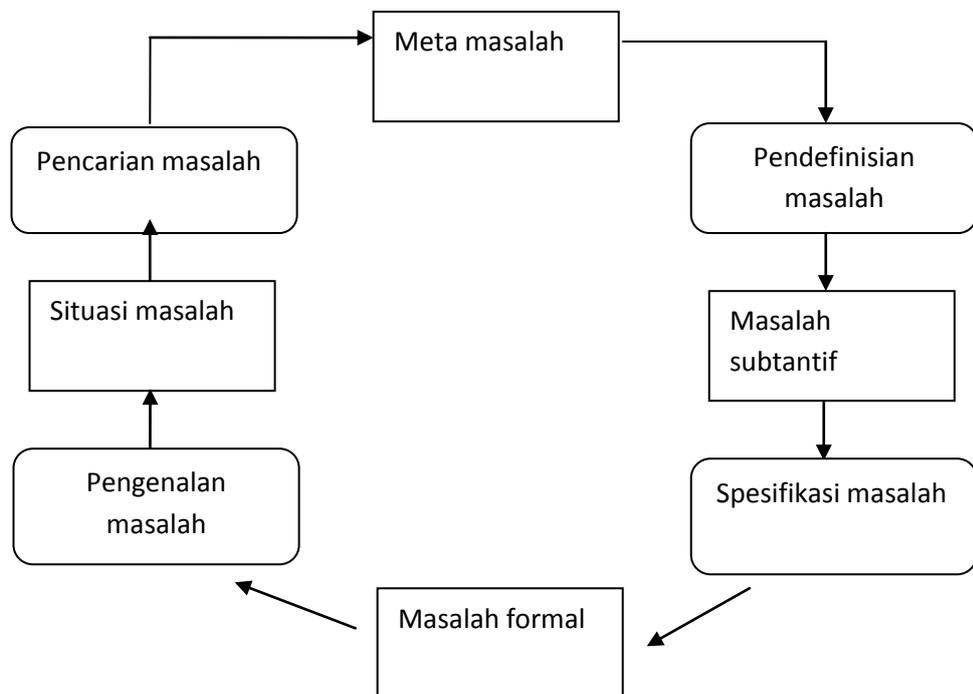
pandangan-pandangan yang berseberangan atau bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Karenanya menurut Dunn lebih lanjut, terdapat fase-fase yang harus dilakukan secara hati-hati dalam merumuskan masalah, sehingga hasil akhir dari kebijakan yang ditetapkan minimal dapat menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Fase-fase tersebut terdiri atas (Dunn, 1999:226) : problem search (pencarian masalah), Problem definition (pendefinisian masalah), problem specification (menyepesifikasi masalah), dan problem sensing (pengenalan masalah). Untuk itu, manakala para analisis berupaya untuk mengenal masalah yang menjadi noumena dari problem yang dirasakan oleh publik, maka langkah awal dari perumusan masalah adalah merasakan keberadaan masalah publik yang dibedakan dengan masalah privat. Untuk itu pencarian masalah menjadi sangat penting keberadaannya. Pada tahap tersebut tujuan jangka pendek para analisis bukan hanya meemukan masalah yang bersifat tunggal melainkan berupaya memanifestasi beberapa masalah yang ada di lapangan. Akibatnya memang para analisis dihadapkan pada meta masalah. Pendefinisian masalah merupakan tahap penganalisisan dari metamasalah ke masalah substantif.

Dalam hal ini para analisis berupaya untuk melakukan pengategorian atas masalah-masalah yang bersifat dasar dan umum (apakah masalah tersebut masuk dalam masalah ekonomi, politik, sosial atau lainnya). Ketika masalah substantif dapat didefinisikan,

maka masalah formal yang lebih rinci dan spesifik dapat dirumuskan. Proses penganalisisan atau perpindahan dari masalah substantif ke masalah formal melalui problem specification, yang secara tipikal meliputi pengembangan representasi model matematis formal dari masalah substantif. Pada bagian pengenalan masalah kesulitan akan sangat mungkin terjadi karena hubungan antara masalah substantif yang berupaya menyepesifikasi masalah dalam terminologi matematis formal, seringkali tidak sesuai dengan representasi formal dari masalah yang ada. Mengenai fase-fase perumusan masalah yang ditawarkan oleh Dunn dalam rangka merumuskan atau memformulasikan kebijakan publik dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Bagan 1 :

Fase-fase perumusan masalah



Merujuk pada apa yang dipaparkan oleh Dunn dapat kita simpulkan bahwa hal terpenting lain dalam formulasi kebijakan selain merumuskan masalah adalah menemukan masalah publik yang dibedakan dengan masalah privat. Diluar itu semua, untuk maksud formulasi kebijakan, suatu masalah formal juga dapat didefinisikan sebagai kondisi atau situasi yang menimbulkan keinginan, kekusaran atau ketidakpuasan pada sebagian banyak orang yang berupaya untuk mencari perbaikan. (Anderson, 1984:57-58). Dalam ranah tersebut Anderson pun membedakan masalah dalam dua kategori, yakni : masalah publik dan masalah privat. Masalah-masalah, seperti : pendapatan yang rendah, udara yang polutif, makanan yang tidak sehat, banjir, atau prosedur pemeriksaan pengadilan yang berbelit,dapat menjadi masalah publik jika atau manakala memang problem tersebut menimbulkan cukup kegelisahan atau ketidakpuasan yang menyebarkan orang-orang (yang memiliki kesadaran bersama akan masalah yang mereka rasakan bersama)berusaha ntuk mencari perbaikan.

Namun, apabila suatu kelompok mempunyai penghasilan yang rendah, misalnya atau merasakan polusi udara disekitar perumahan yang mereka tempati tetapi menerima kondisi tersebut dan tidak melakukan suatu apapun atau tidak mendatangkan reaksi bagi banyak orang lain yang berkepentingan, maka sesuai dengan definisi diatas tidak dapat digolongkan pada masalah publik. Ia

tetap menjadi masalah privat yang dirasakan oleh segelintir atau minoritas warga masyarakat.

c. Aktor kebijakan publik di Indonesia

Di Indonesia, di era reformasi ini, aktor kebijakan (lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan adalah

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Presiden
4. Pemerintah;
  - a. Presiden sebagai kepala pemerintahan(pemerintah pusat)
  - b. Menteri
  - c. Lembaga pemerintah non departemen
  - d. Direktorat Jenderal
  - e. Pemerintah daerah provinsi
  - f. Pemerintah daerah kota/kabupaten
  - g. Kepala desa
5. Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
6. Dewan perwakilan rakyat daerah kota/kabupaten
7. Badan perwakilan desa

d. Implementasi kebijakan.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis

dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3), yaitu : adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas.

Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien. Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and public policy* (1983:61), mendefinisikan mplementasi kebijakan sebagai, pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan ,

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000:104) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

e. Evaluasi

Bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan adalah Evaluasi kebijakan. Umumnya ketika kita berbicara mengenai evaluasi, asosiasi pikiran kita dihubungkan dengan perkiraan atau penaksiran atas kebijakan yang tengah diimplementasikan.

Namun sebenarnya tidak hanya itu. Evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Menurut Lester dan Stewart (2000:126) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Analisis kebijakan akhir-akhir ini adalah program evaluasi yang sistematis dan objektif untuk mengukur dampak sosial dan keberlanjutan kehidupan sistem sosial itu sendiri. James Anderson

menyebutnya sebagai evaluasi yang sistematis. Oleh karena itu, evaluasi sistematis, menurut James Anderson lebih lanjut, akan memperhatikan langsung pengaruh kebijakan pada keinginan masyarakat atau permasalahan yang dapat ditimbulkannya dan evaluasi sistematis memberikan pada para analisis, dan masyarakat mengenai beberapa catatan tentang pengaruh kebijakan yang terjadi serta membuka wacana dan bahkan, pembicaraan mengenai kebijakan dengan orang-orang yang akan dan telah mengalaminya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan akan dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan program yang telah berlangsung dan juga membantu merencanakan kebijakan lain dimasa mendatang.

## 2. Pembangunan

Menurut Prof.Dr.Budi Winarno, di dalam bukunya Etika pembangunan menjelaskan, kata kunci yang tak pernah ditolak oleh para teoritis pembangunan bahwa adalah kewajiban bersama untuk menciptakan masyarakat sejahtera di seluruh dunia.

Adrian Leftwich (2000:17), salah seorang penulis politik pembangunan, mengemukakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat dikategorikan ke dalam sembilan pendekatan pokok, yakni pembangunan dilihat sebagai kemajuan historis (*development as historical progres*), pembangunan sebagai eksploitasi sumber daya alam (*development as the exploitation of natural resources*), pembangunan sebagai promosi kemajuan ekonomi, dan (kadang kala) sosial, dan politik yang direncanakan (*development of planned economic, and (sometimes)*

social and political advancement), pembangunan sebagai suatu kondisi (development as a condition), pembangunan sebagai suatu proses (development as a process), pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi (development as economic growth), pembangunan sebagai perubahan struktural (development as structur change), pembangunan sebagai modernisasi (development as modernization), dan pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi (development as an increase in the forces of production)

Usaha-usaha mengejar pertumbuhan selalu didorong oleh motivasi untuk investasi, produksi, dan konsumsi. Lingkaran kegiatan ini memberikan kontribusi besar bagi menurunnya kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan menciptakan dua persoalan, yakni mengecilnya sumber-sumber daya alam dan pencemaran. Mengecilnya sumber daya alam terjadi sebagai akibat pemanfaatan bahan-bahan produksi yang dibedakan atas dua bagian pokok, yakni sumber alam bahan mentah sebagai bahan dasar industri dan sumber daya alam energi. Oleh karena itu semakin tinggi tuntutan akan pertumbuhan ekonomi suatu pemerintahan maka semakin banyak sumber-sumber alam yang dibutuhkan dan dengan demikian semakin menipislah persediaan-persediaan sumber-sumber alam.

Dengan demikian pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dampak pada segi sosial dan Lingkungan (Salim, 2010:84). *Pertama*, pembangunan sosial ditujukan pada pemberantasan kemiskinan struktural diberbagai bidang, seperti ketiadaan akses pendapatan, lapangan kerja, air

minum, jasa energi, pemukiman, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

*Kedua*, pembangunan ekonomi harus mengubah pola produksi dan konsumsi yang tidak menopang keberlanjutan, terutama dalam penggunaan energi alam (Hutan, tanah, pantai dan laut) secara boros. Konsumsi juga perlu diarahkan pada upaya daur ulang bahan kemasan dan hemat minyak karbon. Ketiga, penyelamatan dan perlindungan ekosistem serta fungsi lingkungan dari sumber daya alam, agar mampu menopang proses pembangunan.

### 3. Pembangunan kabupaten ponorogo

Dalam merepresentasikan serta mewujudkan visi pemerintahan Kabupaten Ponorogoyakni mewujudkan Masyarakat Ponorogo yang sejahtera, aman, berbudaya, berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan dalam rangka mewujudkan “**RAHAYUNING BUMI REYOG**” sebagai tujuan dalam pembangunan Ponorogo tahun 2010-2015, digunakan berbagai pendekatan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi masyarakat Ponorogo adalah:

a..*Pendekatan kultural*. Pemilihan pendekatan ini berdasarkan pada realitas masyarakat yang bersifat heterogen. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pluralisme dalam kehidupan masyarakat Ponorogo. Di samping itu, masyarakat Ponorogo merupakan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang cukup kuat. Pemikiran inilah yang mendasari penggunaan pendekatan kultural dari pada pendekatan ideologis maupun birokratis.

b. *Pendekatan dialogis*. Sesuai dengan dinamika masyarakat yang menginginkan satu tatanan pemerintahan yang lebih profesional, transparan dan akuntabel, maka pendekatan dialogis merupakan pijakan awal alur komunikasi publik yang menekankan nilai-nilai reformatif. Pendekatan dialogis menekankan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

c. *Pendekatan Linear*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan berbagai tahapan-tahapan pembangunan yang harus dilalui. Dengan adanya maksimalisasi tahapan-tahapan dalam mewujudkan “Rahayuning Bumi Reyog”, maka tidak akan ada tahapan-tahapan yang terlewati atau mungkin tidak tergarap sama sekali.

d. *Pendekatan transformatif*. Pendekatan ini didasarkan pada adanya tuntutan global akan berbagai perubahan di segala lini kehidupan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan lagi dalam kehidupan sosial

Setidaknya ada beberapa strategi yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, mengolah dan mencari solusi berbagai persoalan dan pengembangan potensi sosial serta Pembangunan di Kabupaten Ponorogo 2010-2015, antara lain :

a. Reinforcement.

Strategi ini digunakan untuk memperkuat basis-basis potensi sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo. Berbagai potensi sosial yang sudah mapan yang ditandai dengan

munculnya kantong- kantong aktifitas sosial lebih diperkuat dengan harapan dapat menjadi lebih meningkat dan berimplikasi semakin luas. Tidak saja pada level lokal, namun diharapkan bias berimplikasi pada level regional, nasional ataupun internasional.

b. Pemberdayaan dan Pendampingan.

Ini dimaksudkan sebagai langkah untuk mengurangi berbagai keterbelakangan dan dependensi kehidupan masyarakat. Ini didasarkan pada argument bahwa salah satu keterbelakangan masyarakat karena adanya ketergantungan pada *mode of production* yang menyebabkan melemahnya aspek-aspek kreativitas.

c. Titik berat pembangunan mengarah ke wilayah pedesaan.

Kondisi ini semakin dirasakan sebagai hal yang mendesak karena adanya ketimpangan dan kesenjangan yang nyata antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan tersebut pada Pemerintahan Tahun 2010-2015 titik berat pembangunan di Ponorogo berada di pedesaan. Hal ini bukan berarti pembangunan wilayah perkotaan akan diabaikan, akan tetapi prosentase pembangunan wilayah pedesaan akan lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

d. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat.

Dalam pendekatan ini mengedepankan partisipasi rakyat

(*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup rakyat.

e. Pembangunan ekonomi melalui pendekatan *Pro Growth, Pro Job Pro-Poor, Pro Gender dan Pro Enviroment*.

Melalui strategi *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta sehingga semakin banyak masyarakat Kabupaten Ponorogo yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan, serta memperkuat perekonomian.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi *progrowth, pro jobs, pro poor, pro gender dan pro enviroment*, telah memberikan arah pembangunan yang benar, menyeluruh, berkeadilan dan berkelanjutan. Secara lebih terperinci, dalam agenda *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 2005-2009, laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2005 perekonomian Kabupaten Ponorogo mampu tumbuh sebesar 4,11%, tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 4,93% dan pada tahun 2007 kembali naik menjadi 6,56%. Naum dengan adanya krisis energi dan pangan yang melanda dunia, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan hingga hanya tumbuh

5,68%.Goncangan krisis global nampaknya belum bisa mendongkrak pertumbuhan Kabupaten Ponorogo hingga pada tahun 2009 hanya mampu tumbuh sebesar 5,16% namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang hanya 4,50% dan Propinsi Jawa Timur yang hanya pada kisaran 5,06% merupakan prestasi yang patut kita hargai dan diapresiasi.

f. Pembangunan dengan melibatkan peran wanita.

Sebagai warga negara, wanita dan laki-laki dalam hukum dan perundang undangan tidaklah berbeda. Namun demikian sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri selama ini secara umum peran wanita masih termarginalkan utamanya dalam proses pembangunan. Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan dan meningkatkan peran gender menjadi suatu dimensi yang integral mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program nasional merupakan strategi pengarus utamaan gender (PUG). Strategi ini dibangun dengan tujuan pokok adalah tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, dengan harapan tercipta kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, social, ekonomi, budaya, memperoleh rasa aman dan nyaman serta

menikmati hasil-hasil pembangunan.

Strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam perspektif gender adalah mengintegrasikan persepektif gender ke dalam kebijakan, program-program, proyek-proyek, aktifitas pembangunan disemua sektor pemerintahan, mengadopsi persepektif gender ke dalam siklus perencanaan, Mentransformasikan keseluruhan proses dan kerangka kerja perencanaan pembangunan yang responsif terhadap gender. memperhitungkan dampak dari peran gender dan hubungan gender terhadap ketidaksetaraan dalam memperoleh akses dan manfaat khususnya dampak negatif terhadap perempuan serta menciptakan suasana kondusif agar PUG lebih mudah diterima dan dilaksanakan.

- g. Pembangunan berpusat pada rakyat menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku.

#### 4. Teori Konflik

Conflict of interest adalah sebuah konflik berkepentingan yang terjadi ketika sebuah individu atau organisasi yang terlibat dalam berbagai kepentingan, salah satu yang mungkin bisa merusak motivasi untuk bertindak dalam lainnya. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik, dalam kamus

besar Bahasa Indonesia (2002) diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Menurut Kartono & Gulo (1987), konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Sebuah konflik kepentingan hanya bisa ada jika seseorang atau kesaksian dipercayakan dengan ketidakberpihakan beberapa jumlah sedikit kepercayaan diperlukan untuk menciptakannya.

David E. Apter mengemukakan bahwa terdapat terdapat 3 sumber konflik yakni ideologi, Nilai dan kepentingan(ekonomi dan kekuasaan). Semakin banyak sumber konflik yang menjadi penyebab, maka konflik semakin sulit diselesaikan. Karl Marx menyebutkan bahwa sumber konflik berasal dari kesenjangan sosial dalam masyarakat, selama masih ada kesenjangan ekonomi maka akan selalu ada konflik. Terdapat 2 pelaku konflik sesuai yang dinyatakan oleh Maurice Duverger, yakni Pelaku individu dan kelompok (perjuangan ekonomi dan sosial kultural). Didalamnya terdapat bentuk konflik yakni Konflik vertikal antara rakyat dan penguasa, kemudian bentuk konflik horizontal yakni sesama rakyat.

#### 5. Teknik Penambangan

Kegiatan penambangan harus memperhatikan aspek lingkungan, menjaga aset pembangunan khususnya wilayah penambangan dan

memperhatikan kesehatan keselamatan kerja. Setiap pengambilan bahan galian penambangan harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada teknik penambangan yang benar.

Teknik penambangan adalah tata cara penambangan yang telah mempertimbangkan faktor keselamatan kerja, dampak lingkungan, optimalisasi pemanfaatan cadangan bahan galian, dan efisiensi kerja.

Secara garis besar sistem penambangan dibagi dua jenis, yaitu :

a. Sistem tambang terbuka

Sistem penggalian cadangan bahan galian yang semua kegiatan pekerja pada bidang penggalian berhubungan langsung dengan atmosfer bumi.

b. Sistem tambang bawah tanah

Sistem penggalian cadangan bahan galian yang semua kegiatan pekerja pada ruang penggalian tidak berhubungan langsung dengan atmosfer bumi.

Dalam menentukan sistem penambangan terhadap suatu bahan galian, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Posisi cadangan bahan galian, apabila terdapatnya dekat dengan permukaan tanah lebih baik digunakan sistem tambang terbuka.

b. Sifat fisik cadangan bahan galian dan batuan sampling.

c. Struktur geologi.

d. Pertimbangan ekonomi, yaitu membandingkan efisiensi biaya antara beberapa kemungkinan sistem penambangan yang dapat dilakukan.

Berdasarkan pada potensi bahan galian yang berada di kabupaten

Ponorogo, terutama bahan galian logam dan bahan galian industri,

maka sistem penambangan yang diterapkan adalah sistem tambang terbuka, dengan variasi bentuk penambangan, yakni :

1. Open pit, sistem penambangan yang diterapkan untuk cadangan bahan galian yang mengandung logam. Misalnya : emas, mangaan dan galena.
2. Quarry, sistem penambangan yang diterapkan untuk cadangan bahan galian industri. Misalnya : Andesit, dan batu gamping.
3. Alluvial Mining, sistem penambangan yang diterapkan untuk endapan alluvial (endapan sungai) biasanya dengan tambang semprot.

#### **G. Definisi Operasional**

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi : “ Definisi operasional adalah suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variable dapat diukur” Yang dimaksud dengan definisi operasioanal adalah penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variable. Dengan kata lain adalah semacam petunjuk pelaksanaan sebagaimana caranya mengukur suatu variable.

Definisi Operasional merupakan perincian mengenai kegiatan penelitian dalam mengukur ataupun yang dipandang sebagai indikator-indikator suatu variable dari pengertian tersebut atau dengan kalimat lain definisi operasional adalah uraian secara rinci tentang bagaimana variable-variabel akan diukur atau apa indikator-indikatornya.

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1) Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ke seluruh bidang pembangunan;
- b. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan;
- c. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten;
- d. Meningkatkan upaya terwujudnya kebutuhan masyarakat akan terciptanya lingkungan yang bersih dan berkualitas;
- e. Peningkatan kepekaan dan upaya – upaya dalam mengatasi isu lingkungan yang telah menjadi isu global dan tuntutan – tuntutan terhadap kegiatan yang berwawasan lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur;
- g. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

2) Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran aktif dari sektor pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha (swasta);
- b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten;

- c. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup;

## **H. Metode Penelitian**

Menurut Prof.Dr.Sugiyono ( 2013: 2 ) mengatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Miles and Huberman (1994) dalam Sukidin (2002:2) metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sedangkan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Jadi metodologi penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, karena dalam hal ini desa Ngrogung sebagai tempat penambangan.

## 2. Informan

### a. Penentuan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai fakta-fakta permasalahan yang akan diteliti. ( Suharsini Arikunto, 2002:122).

Dalam penentuan informan di penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu ditarik dengan cara sengaja dikarenakan alasan-alasan diketahuinya sifat-sifat sampel itu atau informan yang dianggap tahu masalah secara mendalam tentang persoalan yang diteliti. ( Nyoman Kutha Ratna, 2010:229).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari:

1. 1 Orang Kasi Amdal di Kantor Lingkungan Hidup
2. 1 Orang Staf Amdal di Kantor Lingkungan Hidup
3. 1 kepala desa Ngrogung kecamatan Ngebel
4. 1 pemilik lahan
5. 1 Penambang
6. 5 masyarakat desa Ngrogung.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data guna menunjang penelitian ini penulis menggunakan tehnik-tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara atau interview

Menurut Koentjaraningrat (1977 : 163 ) Wawancara atau interview adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu dan mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari

seorang informan dengan cara tanya jawab kepada pihak yang menjadi obyek peneliti guna mencari data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. ( Suharsimi Arikunto: 2002)

Dokumentasi merupakan sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. (Hardiansyah dalam Siti : 2013)

c. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yakni observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

d. Teknik Analisa Data

Analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis Deskripsi Kualitatif, yang dimaksud adalah penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk intrepertasi secara tepat. Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Nazir dalam (Robby:2010). demikian “ Metode Deskripsi adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, obyek, suatu set kondisi sosial pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang”.

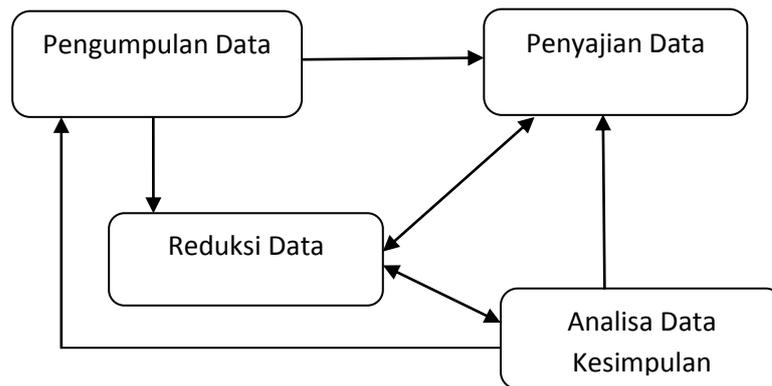
Alasan peneliti menggunakan Metode Deskripsi adalah:

- a. Pemaparan dalam metode deskriptif memungkinkan peneliti dapat menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada.
- b. Pemaparan metode yang diskriptif dapat menjadikan pedoman bagi peneliti untuk menafsirkan data.
- c. Pelaksanaan metode tidak terbatas pada pengumpulan data sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Begitu seluruh data yang diperoleh telah selesai dikumpulkan semuanya di analisis lebih lanjut secara intensif.

Menurut Milles dan Herberman ( 1992 ) Langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut:

## Bagan II

### Analisa Data



Keterangan :

#### a. Penyusunan Data

Kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data sebelum melakukan analisa data, perlu dilihat alat ukur pengumpulan data antara lain dokumentasi dan wawancara atau gabungan keduanya.

#### b. Penyajian Data

Peneliti menggambarkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah bentuk teks cerita/ naratif.

c. Reduksi Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

d. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.